

## **BAB IV**

### **DAMPAK REVOLUSI KEMERDEKAAN DI SUMATERA**

Secara umum dampak revolusi kemerdekaan di Sumatera dan di Jawa tidak jauh berbeda. Dua fenomena historis yang tampak jelas adalah : Pertama, terjadinya peningkatan aktivitas politik di kalangan elit, baik elit nasional ataupun elit lokal yang bertujuan untuk konsolidasi. Kedua, terjadinya revolusi sosial.

#### **A. Peningkatan Aktivitas Elit Politik di Sumatera**

##### **1. Gagasan Penggabungan Jawa-Sumatera**

Pengertian konsolidasi Jawa-Sumatera dalam garis perjuangan Republik adalah penggabungan Sumatera ke dalam wilayah nasional atau pusat. Jawa dikatakan sebagai pusat karena pusat pemerintahan Republik berada di Jawa, Jakarta (1945) dan Yogyakarta (1946). Sedangkan ketika Sumatera menjadi pusat pemerintahan PDRI (1949) tidak termasuk di dalam pembahasan di sini. Argumentasi itu cukup mendasar karena inti pertentangan Indonesia-Belanda sesungguhnya terletak pada nasib masa depan Sumatera.

Pada awal abad XX Sumatera oleh Pemerintah Belanda secara geografi-politik telah disatukan dengan Jawa dan pulau-pulau nusantara yang lain. Namun, Sumatera semenjak jaman Jepang dipisahkan dengan Jawa. Oleh karena itu golongan elit politik Sumatera sejak tahun 1943 mempunyai gagasan untuk menggabungkan Sumatera-Jawa secara politis, artinya mereka memiliki sikap teguh untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia yang meliputi seluruh Nusantara. Keinginan itu diutarakan kepada pihak Jepang dalam suatu lawatan para wakil Sumatera ke Jepang. Wakil Sumatera terdiri dari kalangan pamong praja, yakni Tengku Mohammad Hassan dan Nyak Arief (Aceh), Z.A. Sutan Komala Pontas dan R. Patuan Natigor L. Tobing (Tapanuli), Mr. M. Yusuf dan Zainudin (Medan), Mas Syarif (Bangka), Ir. Indra Tyaya (Bengkulu), Demang

Abdurrozak dan Raden Hanan (Palembang), Hasan Pasaman (Lampung), Abdul Manan (Jambi), Syamsudin (Riau), dan Datuk Majo Urang dan M. Syafei (Sumatera Barat). Gagasan penggabungan Sumatera – Jawa sulit terwujud karena rombongan delegasi dari Sumatra gagal bertemu delegasi dari Jawa, Sutardjo dan Parada Harahap, lantaran Jepang tidak mengizinkan kedua delegasi bertemu.<sup>1</sup> Perdana Menteri Jepang (1943) selalu menyebut Sumatera Pulau Harapan saat bertemu dengan pemimpin-pemimpin Sumatera.<sup>2</sup> Pernyataan itu mengandung makna bahwa Jepang tetap menghendaki pemisahan Sumatera dan Jawa.

Arti pentingnya integrasi Jawa-Sumatera secara politis adalah kedua pulau ini terkandung potensi penting bagi perjuangan kemerdekaan. Nasionalisme yang terbentuk di Sumatera, khususnya di Aceh dan Sumatera Barat, dan di Jawa tidak lagi dapat disanksikan, yakni bukan nasionalisme yang sempit. Sejak Indonesia merdeka, Hatta memiliki gagasan bahwa Sumatera adalah daerah alternatif dan masa depan perjuangan. Demikian pentingnya Sumatera di mata Hatta, sehingga suatu waktu di awal proklamasi ia pernah memperingati pemuda bahwa “Sumatera boleh jadi lautan api dan tenggelam ke dasar lautan, asal jangan jatuh ke tangan Belanda.”<sup>3</sup>

Integrasi Jawa-Sumatera dalam unit geografi-politik RI terwujud kembali pada awal kemerdekaan. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Sumatera menjadi sebuah propinsi Indonesia. Kenyataan lain adalah pada bulan Juni 1946 Sumatera akan melaksanakan bentuk tingkat-tingkat administrasi pemerintah seperti sistem di Jawa. Sekalipun suatu administrasi terpusat baru menjadi realitas beberapa tahun kemudian.

Dalam perkembangan politik pada tahun 1947, pihak Belanda secara sepihak mendirikan Negara Sumatera Timur melalui politik

---

<sup>1</sup> Abi Hasan Said (1992). Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah. Yogyakarta : Yayasan Krama Yudha, h. 46-47.

<sup>2</sup> Velde., h.47

<sup>3</sup> Kutipan itu diambil oleh Mestika Sed dari Darsyaf Rahman dalam Moh. Rasyid. Rasyid 70 tahun (Jakarta : Mutiara Offset, 1981), lihat Mestika Zed hlm. 39

federalnya. Tiga bulan kemudian (Februari 1948) Belanda mendirikan Negara Sumatera Selatan. Di dalam Negara-negara federal terdapat perasaan pro-republik yang tidak begitu besar di kalangan elit politik dan dukungan yang tidak begitu besar dikalangan rakyat terhadap federalisme<sup>4</sup>.Maka Belanda mengambil cara penyelesaian masalah Indonesia lewat kekuatan militer.

## 2. Konsolidasi Pemerintahan

Setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, maka perlengkapan sebuah negara merdeka pun diperlukan. Hanya sehari setelah proklamasi, UUD yang disusun sebelumnya oleh PPKI disahkan oleh PPKI. Lembaga eksekutif dipilih dan Sukarno-Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Golongan elit politik menyadari bahwa hanya Sukarno-Hatta lah yang dapat berurusan dengan pihak Jepang yang masih berkuasa di Indonesia. Bukan tidak ada yang tidak setuju, seorang wakil dari Sumatera , Dr. M. Amir, menuturkan kepada Dr. Ratulangi sebelum kongres PPKI untuk menyusun negara Indonesia, sebagai berikut :

“.....bahwa ia tidak tertarik kepada kepemimpinan Sukarno, karena pasti akan ditolak oleh Belanda. Kepemimpinan Hosein Djayadiningrat atau Moelia menurut pendapatnya, lebih bisa di terima .....”<sup>5</sup>

Kemudian PPKI yang sebelumnya bertindak sebagai penasehat presiden dibubarkan dan diganti KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 22 Agustus 1945. KNIP di ketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. KNIP selanjutnya menunjuk seorang anggotanya yang berasal dari setiap daerah untuk mendirikan KNI di daerahnya (KNID). Tugas KNID adalah membantu gubernur yang diangkat oleh presiden pada tanggal 19 Agustus 1945. Ketika itu wilayah Indonesia yang meliputi bekas wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi delapan propinsi, yakni

---

<sup>4</sup> M.C. Riclefs. Hlm. 341

<sup>5</sup> Van de Velde., hlm. 147

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Gubernur pertama Sumatera ialah Mr. Tengku Muhammad Hassan, ia ditunjuk oleh presiden Sukarno bersamaan dengan penetapan propinsi-propinsi di Indonesia. Pembagian wilayah propinsi itu diputuskan dalam sidang PPKI di Jakarta (19-8-1945). Delegasi Sumatera mempunyai harapan agar diberikan otonomi dalam urusan-urusan dalam dan luar negeri. Mr. tengku Muhammad Hassan mendesak supaya kabinet pertama Republik yang terbentuk benar-benar kabinet Indonesia, bukan kabinet Jawa.<sup>6</sup>Tampaknya usul itu diterima sidang sehingga kabinet pertama Republik terdapat dua orang dari Sumatera, yakni Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan dan Dr. M. Amir sebagai Menteri Negara tanpa portofolio.

Sebelum ketiga pemimpin Sumatera kembali ke Sumatera, dalam suatu jamuan makan di rumah Maeda telah diperingatkan oleh Sukarno agar tidak membentuk negara sendiri. Sumatera harus tetap merupakan sebuah propinsi.

Setibanya di Sumatera mereka mengunjungi kota-kota besar di Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah untuk melakukan konsolidasi dengan pemimpin-pemimpin politik setempat. Mereka memberi pengarahan dan keterangan hasil kongres di Jakarta dengan maksud supaya memberikan dukungan kepada Republik, adapun garis-garis politik RI adalah :

1. Adanya Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak ada sangkut pautnya dengan Jepang.
2. UUDS telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
3. Dokumen-dokumen lainnya mengenai KNI, Penjaga Keamanan Rakyat dan PNI.
4. Petunjuk-petunjuk lainnya mengenai pengambil-alihan kekuasaan dari Jepang.

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 149 : Lihat juga Pelzer, hlm. 158

Para pemimpin itu juga mendesak agar membentuk panitia untuk seluruh Sumatera (KNI Sumatera). KNI Sumatera dapat dibentuk di Bukit Tinggi yang dipimpin Dr. Gindo Siregar. Pembentukan KNI itu diikuti oleh para tokoh nasionalis di tingkat karesidenan sampai wilayah yang terkecil, misal nagari (Minangkabau), marga (Palembang), dan sebagainya.

Pada hakekatnya KNI adalah penjelmaan dari cita-cita demokrasi dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Konsolidasi pada tahap awal oleh pemerintah pusat sejak kemerdekaan adalah menyatukan seluruh golongan sosial yang beragam latar belakangnya, ideologi-politik, agama, kedudukan sosial dan rasial. Tujuan utama konsolidasi itu sudah tentu untuk mempertahankan kemerdekaan. Kekuatan sosial yang terintegrasi dalam wadah negara RI merupakan faktor pendukung revolusi yang amat penting saat itu. Seluruh kekuatan sosial dalam segala lapisan masyarakat diinstruksikan oleh pemerintah pusat agar mempunyai wakil-wakilnya di dalam Komite Nasional, sehingga KNI betul-betul menjadi perwakilan rakyat daerah. Demi keselamatan perjuangan wakil-wakil rakyat bebas mengajukan usul-usul kepada pemerintah.

KNI di tingkat daerah juga telah dibentuk (September 1945) dari tingkat propinsi sampai pada tingkat daerah terkecil. Pada akhir bulan terjadi sedikit perubahan, yakni berdasarkan instruksi Gubernur Mr. Tengku Mohammad Hassan boleh merangkap ketua KNI Daerah. Sebelumnya di tingkat Karesidenan, seorang Residen sekaligus Ketua KNID.

Sementara itu susunan lembaga-lembaga negara selesai dibuat pada akhir September 1945, antara lain Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Para Gubernur. Pemerintah pusat juga menetapkan semua pegawai pemerintah pusat sebelumnya menjadi pegawai RI. Keputusan pemerintah pusat di Jakarta yang belum dapat dilaksanakan ialah pembentukan partai tunggal negara, yakni PNI (Partai Nasional Indonesia), yang sedianya akan diketuai Dr. A.K. Gani. Pembentukan PNI ditangguhkan karena adanya

pertentangan internal yang berbeda kepentingan, praktis hanya KNIP dan KNID – KNID lah yang merupakan organisasi politik utama.

Dengan munculnya maklumat pemerintah tentang berdirinya partai- partai politik pada tanggal 3 November 1945 maka perbedaan aliran dalam masyarakat diharapkan dapat dihapuskan. Pemerintah memberi kesempatan berdirinya partai-partai politik agar partai-partai politik dapat memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Melalui partai politik semua faham dalam masyarakat diharapkan dapat dikoordinasikan dengan teratur.

Sebenarnya pemimpin-pemimpin itu tidak berhasil menemui tokoh-tokoh politik Sumatera Barat, namun sebelum melanjutkan perjalanan telah meninggalkan dokumen hasil kongres di Jakarta.<sup>7</sup>

Di Medan, Dr. M Amir dan Mr. T. Muh Hassan membentuk KNI Sumatera Timur. Pembentukan KNI itu mendapat dukungan dari golongan pemuda, tetapi para Sultan (elit tradisional) dan pendukung-pendukungnya menentang. Golongan elit tradisional menolak pembentukan KNI karena khawatir hari depan politiknya sendiri.<sup>8</sup>

Sebelum Januari 1946 apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat Pematang Siantar tidak banyak.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan sejak pendudukan kembali Belanda di Sumatera Utara, kaum elit politik hijrah ke Sumatera Barat. Selain itu pecah revolusi sosial di daerah-daerah di Utara dan konflik-konflik bersenjata antara tentara Belanda dan kaum republiken. Praktis pemerintah pusat Sumatera belum dapat memimpin daerah-daerah.

Diharapkan dari sinilah pedoman-pedoman pemerintah untuk seluruh Sumatera dikeluarkan. Pedoman itu tercantum dalam maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1946, yang menjelaskan bahwa Sumatera sebagai satu propinsi dari Republik Indonesia haluan politiknya Tidaklah terlepas dari politik yang dijalankan pemerintah pusat RI. Segala perundingan politik dalam tingkat yang berkenaan dengan status Indonesia

---

<sup>7</sup> Mestika Zed., loc,cit

<sup>8</sup> Pelzer., op.cit., hlm. 159

<sup>9</sup> Ibid

dilakukan di Jawa oleh kabinet. Rakyat Sumatera berdiri teguh di belakang Presiden dan Kabinet Syahrir, menegakkan kemerdekaan dan mempertahankan Republik dengan sekuat-kuatnya.<sup>10</sup> Dengan demikian konsolidasi yang bersifat hubungan instruksional antara pusat (Jawa) dan daerah (Sumatera) baru dimulai sejak bulan Januari 1946. Tidak kalah pentingnyakonsolidasi di Sumatera pada masa sebelumnya selama lebih empat bulan. Oleh karena itu politisi daerah Sumatera sangat menonjol aktivitasnya selama bulan-bulan awal itu. Lebih-lebih waktu itu adalah “masa menunggu” kehadiran sekutu yang berkewajiban melucuti senjata Jepang dan melepaskan tawanan tentara Belanda, maka konsolidasi sangat menentukan bagi terwujudnya kesatuan nasional.

Konsolidasi diawal revolusi begitu jelas terlihat kepercayaan Sukarno kepada pemimpin-pemimpin daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Telah disadari oleh kaum nasionalis bahwa komunikasi dan konsultasi antara Jawa dan luar Jawa sangat sulit. Demikian halnya hubungan antar daerah di Sumatera yang oleh Jepang memang dibuat terpisah-pisah.<sup>11</sup> sehingga dikhawatirkan semangat kemerdekaan yang tinggal di kalangan golongan pemuda di daerah-daerah akan berakibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam aksi-aksinya. Gerakan pemuda yang tidak terkoordinasi justru akan merugikan revolusi, bentrokan dengantentara Jepang, perampasan harta orang Cina dan lain-lain merebak di daerah-daerah. Tentara Jepang belum bersedia meninggalkan kantor-kantor maka pengambilalihan gedung-gedung perkantoran sering menimbulkan konflik. Suasana begitu revolusioner, seperti di Bukit Tinggi, Padang, ketika masa rakyat menaiki Bendera Merah Putih di Jam Gadang, jika tidak terkoordinasi akan menyebabkan anarki.

---

<sup>10</sup> BPSIM., loc.cit., hlm. 225-227

<sup>11</sup> Mestika Zed., op.cit.

### **3. Konsolidasi Kekuatan Sosial Politik**

Masa antara pertengahan Agustus 1945 sampai 1946 merupakan “masa menunggu” dan sekaligus sebagai “Periode bersiap” bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia sudah merdeka tetapi sebenarnya Jepang masih berkuasa sampai digantikan oleh sekutu yang menang perang. Selama menunggu kedatangan pihak sekutu, golongan elit politik begitu sibuk melakukan kegiatan melaksanakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bilamana sekutu akan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. Konsolidasi disegala segi mempunyai arti penting bagi eksistensi negara Indonesia merdeka.

Kaum elit politik Sumatera sejak mendengar berita proklamasi Kemerdekaan sudah melakukan konsolidasi dimasing-masing daerahnya. Para pemimpin lokal berupaya menghimpun kekuatan dari golongan pemuda. Tentara Jepang tetap berusaha menjaga keutuhan kekuasaannya untuk dilaporkan dan diserahkan kepada pihak Sekutu. Sepenuhnya Jepang belum mengundurkan diri dari kekuasaannya. Sementara bangsa Indonesia sudah harus memiliki dan memasang simbol-simbol negara merdeka. Melalui rapat-rapat pada umumnya instruksi ke dalam badan-badan perjuangan yang disampaikan kepada golongan pemuda mengacu kepada arahan dari pemerintah pusat yang dibawa oleh delegasi Sumatera dari Jakarta. Dengan demikian jaringan konsolidasi Jawa-Sumatera dan daerah-daerah telah ada dalam bentuknya yang sederhana.

Untuk mengkaji masalah konsolidasi kekuatan sosial dan politik sudah tentu diperlukan pemahaman tentang golongan-golongan sosial dan politik yang terdapat di Sumatera pada waktu itu. Dalam bagian terdahulu telah diuraikan adanya golongan-golongan sosial yang tampil sebagai pendukung revolusi dan yang kontra revolusi. Keduanya tidak mudah digabungkan karena berbeda pandangan politik dan latar belakang sosial ekonomi serta sejarahnya. Golongan elit politik bersama kaum mudanyadi Sumatera mungkin dapat dikatakan gagal dalam proses penyatuan secara “damai”. Dengan demikian konsolidasi melalui cara kekerasan yang



terjadi, sehingga dampak penyatuan itu antara lain pecahnya revolusi sosial. Tentang dampak konsolidasi itu akan dibahas tersendiri dibagian terakhir penelitian ini.

Golongan sosial ataupun kelompok-kelompok sosial pendukung revolusi memang banyak jumlahnya. Dapat ditarik perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan diplomasi dan bersenjata, antara golongan kiri dan kanan, antara golongan tua dan muda, antara golongan Islam dan sekuler, antara golongan pro dan kontra revolusi sosial dan sebagainya. Penelitian-penelitian akademis tentang revolusi nasional berusaha untuk mendapat semacam struktur mengenai masa yang pada dasarnya kacau balau. Tidak satupun pembagian dasar diantara bangsa Indonesia tersebut telah terpecahkan diawal revolusi kecuali sepanjang ada kesempatan tentang kemerdekaan sebagai tujuan utama.<sup>12</sup>Kemerdekaan menjadi ideologi politik nasional dan “sama rasa sama rata” merupakan ideologi ekonomi yang berkembang di daerah-daerah. Dalam kerangka yang terbatas semua perbedaan untuk sementara waktu ditinggalkan. Hal ini tidak terlepas dari peranan golongan elit politik dalam aktivitas konsolidasi sebelum dan saat revolusi dimulai.

Pemupukan kesadaran nasional secara terus menerus dilakukan oleh elit politik khususnya menjelang revolusi hingga pecahnya revolusi. Maka tujuan para pemimpin revolusi adalah melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan itu. Bantuan keras terjadi dengan pihak Belanda yang bertujuan menghancurkan sebuah negara baru pimpinan kaum elit yang bekerjasama dengan Jepang. Pihak Belanda ingin memulihkan rezim kolonial yang telah lama dibanggunya.

Reaksi kaum elit politik di Sumatera terhadap kehadiran Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dan mendarat di Sumatera adalah meningkatkan aktivitas konsolidasi melalui propaganda dan intimidasi kepada kelompok-kelompok elit dan masyarakat daerah yang dipandang pro Belanda. Maka golongan elit politik terutama mengarahkan

---

<sup>12</sup> M.C. Ricklefs., loc.cit.

konsolidasinya kepada golongan masyarakat yang pro Belanda. Sesungguhnya Hatta sudah menaruh perhatian terhadap suku-suku di luar Jawa terutama Sumatera, sebelum Belanda datang. Apa yang dipikirkan Hatta mengenai hal itu adalah kekhawatiran terhadap orang-orang yang dulu menyenangkan dan disenangi Belanda akan mendukung Belanda.<sup>13</sup>

Kegagalan Hatta mengunjungi daerah-daerah di Sumatera karena kesibukan urusan di pusat menyebabkan konsolidasi di tingkat daerah mengalami hambatan sehingga kedudukan Belanda makin lama makin bertambah kuat. Catatan Velde menunjukkan bahwa orang Toba menginginkan Belanda berkuasa kembali, berpuluh-puluh pemuka Aceh, Sultan dan pemuka adat di Sumatera Timur, sebagian kaum intelektual, penduduk Bangka, mereka mau diajak kerjasama dengan Belanda.<sup>14</sup>

Aktivitas pengintegrasian kekuatan sosial dan politik dilakukan dengan bermacam-macam cara, antara lain kunjungan pemimpin – pemimpin ke daerah-daerah, pertemuan-pertemuan dan propaganda. Faktor kesulitan transportasi menyebabkan intensitas kunjungan ke daerah-daerah sangat kecil. Namun pertemuan para pemimpin walaupun untuk seluruh Sumatera sangat kurang, tetapi di tingkat daerah-daerah sangat efektif. Konsolidasi yang paling banyak ialah dilakukan oleh pemuda aktivis (kader elit politik/elit politik kelas III) dengan propaganda-propaganda melalui surat kabar berbahasa melayu, pemancar radio dan prasarana lain.

Adapun isi propaganda berupa hasutan-hasutan, teror, dan kebencian terhadap Belanda. Pihak Republik menguasai propaganda, sedangkan Belanda tidak memiliki surat kabar dan pemancar radio. Sementara pihak Inggris menganggap sepi propaganda Republik Indonesia tersebut dan tidak mau mencampuri urusan-urusan politik. Begitu giat propaganda dijalankan bahkan tiap hari selalu ada saja usaha meyakinkan massa secara intensif, bahwa “orang Belanda itu iblis berbentuk manusia,

---

<sup>13</sup> Mestika Zed., loc.cit.,

<sup>14</sup> Van de Velde., op.cit., hlm.138,140,143 dan 151

selama 350 tahun Belanda tidak berbuat apa-apa di Indonesia, kecuali merampok dan membunuh”. Pihak Belanda menganggap para pemimpin itu cukup baik dapat diajak kerjasama, namun individu-individu sering bertindak kurang baik, apalagi militernya.<sup>15</sup>

Surat kabar berbahasa melayu dan radio benar-benar merupakan alat yang efektif. Melalui media komunikasi itu elit politik melancarkan intimidasi yang membuat kelompok kecil intelektual dan pemimpin-pemimpin moderat Sumatera yang oleh Belanda bisa diharapkan menjadi pendukungnya “tidak berani berbuat apa-apa”. Mereka benar-benar takut karena hasutan dan teror, sebagaimana termuat didalam surat kabar-surat kabar, misalnya : “bunuh kutu-kutu itu, culik perempuan-perempuan Belanda”, “merdeka 100%”, “lebih baik mandi darah daripada dijajah” dan sebagainya.

Pengaruh Tan Malaka dan badan perjuangannya (persatuan perjuangan) di Sumatera Timur sangat besar, lebih besar dari elit politik pusat. Disana kaum Republik dijiwai oleh semboyan “merdeka 100%”, golongan ini berhadapan dengan golongan elit tradisional atau pemerintah kerajaan-kerajaan Melayu, Batak Simalungun dan Batak Karo. Kaum Republik menuntut “daulat rakyat”. Kenyataan semboyan seperti itu meluas ke daerah Sumatera yang lain.

Propaganda Sukarno telah membawa rakyat ke puncak semangat. Dengan gaya oratornya yang khas dan cerdas, ia mampu membalikan arus dukungan yang besar kepada Republik sehingga pengaruh politik Belanda tidak dapat berkembang. Propaganda oleh golongan elit telah membuat kebencian kepada orang-orang Belanda. Komunisme, agama dan perbedaan ras dijadikan isu pokok dalam pengintegrasian seluruh kekuatan social dan politik. Wajarlah jika Velde menilai propaganda Sukarno itu memakai cara khas Nazi dan Jepang.<sup>16</sup> Pihak Belanda merasa benar-benar terjepit dan sulit keluar dari situasi seperti itu, sebagaimana terjadi di

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

Medan, Padang dan Palembang. Hanya ada satu jalan yang dapat dilewati Belanda, yaitu perundingan dengan mengakui Republik secara de facto.

Aktivitas elit politik sejak Indonesia merdeka hingga agresi Belanda I (1947) sesungguhnya telah mencapai suatu kesatuan dalam politik untuk menghadapi Belanda. Pada umumnya para pemimpin Belanda tidak memahami hal itu. Keadaan yang sebenarnya di seluruh Indonesia sebagaimana diamati oleh J.J. Van de Velde dapat diketahui dalam kutipan berikut ini:

“kukira, inilah inti problem di seluruh Indonesia : semua perbedaan antara satu sama yang lain, dilupakan dan dipadamkan, selama melawan kolonialisme”.<sup>17</sup>

Situasi seperti itu terwujud berkat kesediaan dan kemampuan elit politik, baik lokal maupun nasional. Peranan Hatta dan Sukarno dalam konsolidasi politik begitu besar. Kurang lebih dua tahun sejak kemerdekaan Mohammad Hatta baru bisa mengunjungi Sumatera. Alasan utama ialah berkaitan meletusnya revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Timur. Revolusi sosial di Aceh yang bercorak Islam tidak begitu mengawatirkan Hatta, tetapi di Sumatera Timur berhubungan langsung dengan unsur-unsur Marxisme dalam kelompok Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka. Di daerah itu, juga di Minangkabau, prestise Tan Malaka sangat tinggi, kelompok PP berjuang melalui garis keras dan menentang perundingan-perundingan dengan Belanda. Disamping itu Hatta juga memandang adanya bahaya di Sumatera Barat, yaitu pecahnya pemberontakan pada bulan Maret 1947 yang diarahkan pada golongan militer dan para administrator daerah itu. Peristiwa itu melibatkan mantan laskar Masyumi dan sebagian pemimpin PNI baru, partainya Hatta sebelum perang. Perpecahan di Sumatera Barat turut mendorong Hatta menyempatkan berkunjung ke Sumatera,<sup>18</sup> untuk mencegah meluasnya konflik politik internal.

---

<sup>17</sup> J.J. Van de Velde., op.cit. hlm. 216

<sup>18</sup> Mestika Zed., op.cit. hlm. 39

Tahun 1946 dan tahun 1947 di Sumatera memang terjadi yang hebat sejalan dengan perkembangan politik nasional. Pada saat perundingan Perdana Menteri Syahrir Van Mook berjalan baik maka di daerah-daerah di Sumatera pun tenang, tanpa teror dan agitasi. Beberapa daerah yang sering mengikuti jalur politik di Jawa adalah Medan, Padang, Palembang dan daerah yang dikuasai Republik lainnya. Daerah-daerah itu akan bergolak apabila pihak Belanda melakukan kecurangan untuk tujuan kolonialisme. Hal ini telah didasari oleh J.J. Van Velde yang kerap kali mendengar dari elit politik Indonesia, seperti dalam pertemuannya dengan

AK. Gani bersama orang-orang Inggris. Begitu pula ia mendengar dari Dr. Amir<sup>19</sup> sebagai berikut :

“orang-orang Indonesia mengatakan bahwa mereka bersikap bersahabat terhadap kita, asal kita membebaskan dan tidak menindas mereka. Mereka tidak anti Belanda, tetapi kolonialisme”.<sup>20</sup>

Identitas nasional dapat pula diketahui dari catatan J.J. Van de Velde berdasarkan pengamatan ketika kunjungan Sukarno pada tanggal 4-6 Juni 1948, ia menyatakan bahwa Sukarno dielu-elukan seperti raja di bukit tinggi, Tapanuli dan Aceh. Sukarno Jelas merupakan lambang hasrat kemerdekaan.<sup>21</sup>

Dalam perkembangan politik di Indonesia, pihak Belanda tidak mengetahui benar keinginan orang-orang Sumatera. Politik federal yang diterapkan untuk memecah-mecah wilayah nusantara menjadi 15 negara federal dipandang sebagai permulaan keberhasilan. Mula-mula Belanda berhasil mendirikan Negara Sumatera Timur, kemudian disusul Sumatera Selatan pada tahun 1947 dan direncanakan berikutnya Negara Sumatera Utara. Akan tetapi sebenarnya di dalam Negara-negara federal

---

<sup>19</sup> Dr. Amir ialah seorang elit politik yang moderat, ia pernah jadi wakil Sumatera dalam kongres PPKI tahun 1945, dan pernah minta perlindungan kepada Belanda dan Inggris ketika pecah revolusi sosial di Sumatera.

<sup>20</sup> Velde., op.cit. 258

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 216

itu hanya ada sedikit yang pro Belanda. Di Sumatera Timur, kelompok minoritas pro Belanda mempunyai kepentingan politik karena khawatir adanya infiltrasi dari orang-orang Minangkabau yang lebih maju dalam intelektualitas. Disana orang Jawa dan Batak dianggap kekuatan yang mengancam kelompok kecil tersebut. Oleh karena itu politik mereka ialah mencari perlindungan kepada Belanda.

Di daerah-daerah lain di Sumatera harapan memperoleh otonomi tidak dapat disamakan anti Republik, bahkan di Sumatera Timur dan Sumatera Selatan sekalipun. Di Tapanuli, ketidakmampuan Belanda melindungi penduduk dari tekanan kaum republiken membuat kepercayaan kepada Belanda hilang. Sementara di Sumatera Barat yang memiliki kekuatan nasionalis besar telah mampu memindahkan prasarana perjuangan untuk melawan Belanda. Termasuk pasar-pasar dapat didirikan dipedalaman. Sementara Aceh yang memiliki ideologi Islam dalam setiap perlawanan dengan Belanda sangat sulit diharapkan.

Dengan demikian pengertian otonomi bukanlah secara luas. Daerah-daerah di Sumatera hanya menginginkan otonomi dalam urusan wilayahnya dan bebas mengadakan hubungan dengan luar. Hal ini telah dituntutkan kepada pemerintah pusat RI pada awal kemerdekaan.

## **B. Revolusi Sosial di Sumatera**

“Revolusi dalam Revolusi” merupakan istilah yang sering dipakai oleh sejarawan untuk menunjuk revolusi sosial di Indonesia. Revolusi sosial mulai dalam bulan November 1945 yang meningkat dengan cepat justru sejak pasukan-pasukan Sekutu. Kebanyakan revolusi sosial diakibatkan oleh persaingan antara elit-elit alternatif, kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau generasi-generasi. Lagi pula biasanya hanya mempunyai arti penting untuk sementara waktu, kecuali di beberapa wilayah di Sumatera.<sup>22</sup> Seberapa penting revolusi sosial di Sumatera bagi republik dan

---

<sup>22</sup> M.C. Ricklefs., *op.cit.*, hlm. 328

apakah ada kaitannya dengan konsolidasi? Di bawah ini akan dicoba untuk menjelaskan masalah itu.

Suatu kenyataan bahwa revolusi sosial di Sumatera terpisah dari politik yang digariskan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian terlepas pula dari kebijakan pemerintah daerah Sumatera, karena garis politik mengikuti Jawa. Sejak semula pemerintah pusat memutuskan penyelesaian masalah dengan cara damai atau diplomasi. Sedangkan revolusi sosial berkaitan dengan kekerasan, perampasan, perampokan, pembunuhan, pembakaran dan pengrusakan-pengrusakan. Para pemimpin pusat tidak banyak berpengaruh terhadap revolusi sosial di Sumatera dan Jawa. Oleh karena revolusi sosial itu tidak dirumuskan oleh elit politik maka meletus secara spontan dan memiliki sifat khusus. Di Sumatera Utara, sifat itu diperlihatkan pada cita-cita modernisasi tanpa melewati “bangsa barat”. Di Batak karo telah terjadi penolakan terhadap lembaga pendidikan yang disodorkan oleh Belanda. Masyarakat dataran tinggi Karo, dan Aceh, beranggapan bahwa kolonialisme identik dengan penaklukan, penindasan dan bencana. Revolusi sosial di sana telah melibatkan golongan petani, suatu konsekuensi logis yang mengikutinya.

Di Aceh, roda revolusi sosial digulirkan oleh PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh)<sup>23</sup> dan melindas golongan bangsawan birokrasi (Uleebalang) pimpinan T. Daud Cumbok di Pidie. Di bawah kendali kaum ulama pimpinan Daud Beureu'eh, revolusi itu telah menggagalkan dan menyingkirkan 107 bangsawan yang ingin mempertahankan kewibawaannya dan mengejek Republik beserta kaum pemudanya.<sup>24</sup> Antara bulan Desember 1945 dan Maret 1946 para Uleebalang terkemuka beserta keluarganya dijebloskan ke dalam penjara atau dibunuh. Pertentangan sosial itu secara historis sudah berakar sejak Perang Aceh, khususnya berkaitan dengan masalah pengurusan tanah, peradilan dan pemerintahan. Pada masa pendudukan Jepang (1942) konflik itu dihentikan oleh Jepang dan kekuasaan bergeser dari Uleebalang kepada ulama. Selama Revolusi Nasional, Aceh dibiarkan tak disentuh Belanda

---

<sup>23</sup> PUSA sebagai pusat gerakan, dan anggota partai – partai terikat dalam disiplin yang digariskan PUSA, seperti anggota Pasindo, PNI, Mujahidin dan sebagainya.

<sup>24</sup> Anton Lucas dalam Colin Wild dan Peter Carey (ed)., *op.cit.* hlm. 160.

sehingga menjadi daerah paling stabil di Indonesia. Sebelum revolusi sosial, banyak Uleebalang yang mengharapkan kembalinya Belanda, tetapi tak kembali, maka tidak terlindungi lagi. Suatu akibat revolusi sosial di Aceh ialah terjadi perubahan permanen di tingkat elit.<sup>25</sup>

Dua di antara revolusi sosial di Sumatra yang penting kecuali Aceh ialah di Sumatera Timur. Peristiwa itu menarik perhatian Hatta secara khusus, yang menyebabkan ia harus berkunjung ke Sumatera. Kunjungan pada tahun 1947 itu merupakan yang pertama kali bagi Hatta sejak kemerdekaan. Revolusi sosial di Aceh yang digerakkan dengan ideologi Islam tidak begitu mencemaskan Hatta, tetapi di Sumatera Timur dipandang membahayakan cita – cita Revolusi Kemerdekaan karena ada unsur Marxisme di dalamnya. Dikhawatirkan strategi Tan Malaka melalui garis keras yang kontra perundingan sejak awal kemerdekaan akan menciptakan militansi yang merugikan Republik. Aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap raja – raja atau sultan – sultan di Sumatera Timur yang dicurigai pro Belanda justru memberi peluang Belanda untuk propaganda bahwa Republik gagal menciptakan keamanan. Sementara masyarakat kalangan bawah merindukan ketentraman seperti yang disinyalir oleh J.J. Van de Velde. Ia juga menyaksikan kekuasaan massa pemuda bersenjata lengkap atau setengah lengkap di daerah – daerah, dan kebanyakan orang menuntut kemerdekaan 100 persen.<sup>26</sup> Ini menunjukkan pengaruh politik Tan Malaka telah meluas di Sumatera, termasuk pula di Sumatera Barat.

Keterkaitan para pemimpin pusat terhadap munculnya revolusi sosial tidak banyak; Sukarno – Hatta tidak menghendaki hal itu terjadi, Sjahrir pun tidak juga banyak berpengaruh karena hanya kalangan terbatas yang mendukungnya. Hanya apabila dibandingkan dengan politisi yang lain, Sjahrir lebih terikat dengan revolusi sosial karena gagasannya yang terlihat pada pamfletnya, yang berjudul “Perjuangan Kita” yang terbit pada Nopember 1945, adalah tentang revolusi sosialis internasional yang berisi soal

---

<sup>25</sup> M.C. Ricklefs., *op.cit.*, hlm. 330-331

<sup>26</sup> Ketika itu J.J. Van de Velde sebagai penasihat pemerintah urusan politik untuk Sumatera. Lihat Velde., *op.cit.*, hlm. 327



demokrasi, anti bangsawan dan anti fasis.<sup>27</sup> Hal ini sebenarnya bumerang bagi Sjahrir tatkala menjabat sebagai Perdana Menteri.

Peristiwa revolusi sosial di Sumatera dianggap merupakan ancaman serius bagi republik setelah ternyata melebar menjadi pertentangan etnis antara Batak Karo dan Mandailing yang berlatar belakang perbedaan agama, yakni Islam dan Kristen. Konflik ini jelas menjadi ancaman integritas perjuangan. Ada kecenderungan perebutan daerah perjuangan di antara kelompok – kelompok pejuang, di samping juga meluasnya konflik dengan tentara Belanda. Sementara itu, Mr. TM. Hassan, Gubernur Sumatera, yang hanya memiliki kekuasaan terbatas di luar Sumatera Utara, nyaris tak memiliki wewenang yang efektif sebagai pemimpin Sumatera.<sup>28</sup> Dua kejadian penting, revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Timur, ditambah lagi dengan menanjaknya popularitas kepemimpinan A.K. Gani diakui pula di lingkungan orang – orang Belanda, hal ini tampak dalam upaya penyelesaian konflik kaum republiken dengan pasukan Belanda di Medan, seperti kutipan berikut ini :

“ ... Di sanapun ada Komisaris Pemerintah De Boer, juga Jenderal Spoor dan Mr. Wright. Mr Wright mendukung usul yang telah diajukan pada pertemuan pertama, yakni mencoba menarik dr. Gani yang sekarang menjabat Menteri Ekonomi, kembali ke Sumatera untuk bersamaku (Colonel Van de Velde) mempengaruhi pemimpin – pemimpin lokal sehingga memungkinkan diadakan pembicaraan – pembicaraan antara pihak Indonesia dan Belanda mengenai kepentingan – kepentingan lokal. Kalau itu berhasil pertumpahan darah mungkin akan terhindarkan.<sup>29</sup>

Kedadaan di Medan memang sangat buruk dalam segala hal; daerah Medan tidak aman dan tertutup, golongan Republikan Aceh dan Batak sudah mengepung kota sejak awal Januari 1946. Massa pemuda menutup saluran air, memutus hubungan dengan daerah – daerah lain dan menghalangi masuknya makanan segar. Penduduk setempat melakukan eksodus besar – besaran menuju Belawan, sekitar 2.000 orang yang terdiri dari orang Belanda, Ambon,

---

<sup>27</sup> M.C. Ricklefs., *op.cit.*, hlm. 327

<sup>28</sup> Mestika Zed., *loc.cit.*

<sup>29</sup> Velde., *op.cit.*, hlm. 160

Cina dan India. Kecurigaan terhadap orang Cina begitu besar sehingga seringkali terjadi bentrokan seperti yang terjadi di Bagan Siapi – Api. Sumatera Barat, dan tempat – tempat lain di Sumatera. Revolusi sosial menangkap orang – orang yang menyimpan uang NICA, menyimpan pakaian kebesaran pegawai Belanda dan lambang – lambang yang lain.

Revolusi sosial juga melanda Pulau Samosir, Tapanuli dan Palembang. Kejadian – kejadian di wilayah tersebut sekalipun tidak penting seperti di Aceh dan Sumatera Timur, namun dapat pula digunakan sebagai bahan propaganda Belanda. Bagi Republik, revolusi sosial yang ditujukan kepada golongan pro Belanda jelas meruakan simbol nasionalisme yang tinggi. Semangat kemerdekaan pada waktu itu terbentuk sebagian dari efektifnya. Propaganda yang gencar oleh Elit Politik di berbagai tingkat dan skala. Propaganda politik telah dapat menggantikan kebencian kepada Jepang menjadi kebencian kepada Belanda. Kelompok kecil kaum moderat dan intelektual yang sekiranya dapat diajak kerjasama oleh Belanda tidak dapat berbuat banyak. Kiranya sulit disangkal bahwa konsolidasi kekuatan sosial dan politik tidak berpengaruh terhadap munculnya revolusi sosial di Sumatra.

Konsolidasi kekuatan perjuangan oleh pemerintah RI melalui maklumat Hatta tentang berdirinya partai – partai politik, pada akhirnya telah menimbulkan kelompok – kelompok sosial politik yang saling bertentangan pada tahun 1947. Di daerah Karo sebagai pendukung PNI telah dicoreng oleh Kelompok Harimau Liar. Golongan elit politik Tapanuli (pimpinan pemerintahan dan anggota KNI) ditanggapi oleh Kelompok Pesindo Tapanuli, keadaan ini berbalik ketika pasukan pemerintah berhasil mengatasinya. Perang saudara kecil – kecilan meletus di pelbagai daerah lain dalam bentuk yang berbeda.

Golongan pemuda Persatuan Perjuangan terdiri dari pemuda bersenjata Aceh, Karo, dan Batak Toba, di samping telah menggeser penduduk asli Sidikalang (Batak Dairi) juga menumbangkan kekuasaan resmi Batak Toba. Bentrokan antar suku itu meruntuhkan tradisi otonomi pedesaan.

Berhentinya revolusi sosial di Sumatera Timur ternyata diikuti oleh pertentangan politik di tingkat elit setempat dalam berebut kekuasaan. Persaingan terjadi antara PKI dengan golongan Islam dan PNI, dan berkembang antara pendukung partai bahkan dengan TRI. Kekuatan – kekuatan yang bersaing, yakni Pesindo, Napindo dan TRI. Juga terdorong oleh motivasi ekonomi hasil revolusi sosial. Konflik yang hampir serupa terjadi di pusat pemerintahan di Pematang Siantar , orang – orang Batak Toba menuduh golongan elit politik dan militer menyelewengkan kekayaan. Pengaruh Mr. T.M. Hassan di kalangan tentara Aceh telah mampu mencegah membesarnya konflik.

Pelbagai peristiwa pertentangan sosial dan politik tersebut memberi peluang pihak Belanda untuk mendukung orang – orang yang dirugikan dari revolusi sosial. Dengandemikian revolusi sosial justru merusakkan persatuan dan cita – cita melenyapkan kolonialisme. Keadaan seperti ini berubah menjelang agresi militer Belanda I berkat aktivitas elit politik dan pemimpin militer pusat, khususnya Pidato Panglima Besar Sudirman di Yogyakarta.